

Sikap Politik Mahasiswa Kota Padang Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

M.Nursi¹, Pebriyenni², Darwianis³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, Indonesia.

m.nursi01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the attitude of PPKn students towards government policies in handling Covid-19 at private universities in Padang. The attitude of the people in Padang tends to be divided after the 2019 presidential election. This makes an impacts in assessing the government's policy on handling of Covid-19. The student respondents is important as they are prospective Civic Education teachers who would shape students' attitudes as citizens in the future. This study uses a quantitative approach, with research variables measured through self-developed valid and reliable questionnaires. Total population are 121 students and a sample of 95 people (78.51%). Data collection uses a Likert Scale angle model with data analysis techniques using SPSS-20. The results of the study show that students' political attitudes towards the government's Covid-19 policies are not strong enough (42.9%). This means that student respondents can comply with government appeals on Covid-19 regardless of the ruling political party. Political polarization usually remains, which can affect people's views on how government handling of Covid-19. However, in this study shows that students can assess objectively and do not link government policies with political party allies who have previously been polarized.

Keywords: Political attitude, policy on Covid-19, PPKn students, president elections 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sikap mahasiswa PPKn di Perguruan Tinggi Swasta Kota Padang terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sikap masyarakat di Kota Padang yang cenderung terbelah pasca Pilpres 2019 berhubungan dengan respons yang berbeda dalam menilai penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah. Responden mahasiswa yang diteliti merupakan calon guru PPKn yang akan membentuk sikap siswa sebagai warga negara di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan variabel riset yang diukur melalui kuisioner valid dan reliabel yang dikembangkan sendiri. Jumlah populasi sebanyak 121 mahasiswa dan sampel 95 orang (78,51%). Pengumpulan data menggunakan angket model Skala Likert dengan teknik analisis data menggunakan SPSS-20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan Covid-19 pemerintah adalah kurang kuat (42,9%). Hal ini berarti bahwa responden mahasiswa dapat mematuhi himbauan pemerintah terkait Covid-19 tanpa melihat partai politik yang berkuasa. Polarisasi politik yang terjadi pada Pilpres 2019 biasanya masih membekas yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penanganan Covid-19. Namun dalam penelitian ini terlihat bahwa mahasiswa dapat menilai secara objektif dan tidak menghubungkan kebijakan pemerintah dengan afiliasi politik partai yang sebelumnya sudah terpolarisasi.

Kata Kunci: Sikap politik, kebijakan Covid-19, mahasiswa PPKn, Pilpres 2019



PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai efek negatif dalam masyarakat. Salah satunya adalah polarisasi sebagai respon sosial dan politik. Masyarakat membentuk opini, persepsi, sikap, dan tindakan reaktif yang konfrontatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Kondisi tersebut memicu munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dengan kepentingan dan tujuan politiknya (Nugroho, 2021). Kelompok tersebut berusaha menonjolkan dikotomi identitas sosial, politik etnik dan sikap primordialismenya (Wadipalapa, 2021).

Mahasiswa merupakan salah satu segmen sosial di tengah masyarakat yang terlibat langsung dalam kondisi ini. Mereka mencermati hiruk pikuk dan fenomena konflik sosial dan politik yang terjadi melalui pemberitaan media massa. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa tidak bebas dari pengaruh kondisi segmentatif yang terjadi dalam masyarakatnya. Kompleksitas fenomena tersebut memiliki hubungan psikologis melalui justifikasi nilai-nilai kebenaran oleh kelompok politik, terutama oleh kelompok pemenang-kalah dalam Pilpres 2019 (Gustomy, 2020).

Kondisi tersebut memberikan kesan bahwa terdapat upaya penggiringan opini dan aksi yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi kelompok tertentu. Di era teknologi informasi sekarang ini telah memudahkan suatu informasi diterima atau dibagikan tanpa adanya cek dan ricek. Rendahnya literasi politik masyarakat, tidak kecuali di kalangan mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang mempolitikasi Covid-19. Hal ini dikarenakan pengetahuan politik mahasiswa yang kurang memadai sehingga mereka berpotensi untuk mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik (Jiwandono, 2020).

Polarisasi politik dapat terjadi karena seseorang dapat dengan mudah bias dalam persepsi dan penalarannya. Polarisasi politik juga berhubungan dengan isu-isu diskriminasi, multikulturalisme, agama, imigrasi, hak asasi manusia, terorisme, perang saudara, dan persenjataan nuklir (Dixit, 2007). Kondisi polarisasi berhubungan dengan kognisi dan afeksi diri mahasiswa. Hal ini berarti, mahasiswa tidak bisa bebas dari proses polarisasi nilai dalam menyikapi kebijakan penanganan Covid 19.

Penelitian ini berusaha melihat polarisasi sikap politik mahasiswa dalam menghadapi kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Hal ini disebabkan karena mahasiswa harus dapat menjadi pelopor kritisisme dalam gerakan perubahan di tengah masyarakat. Persoalan ini penting untuk diteliti terkait peran mahasiswa, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bertugas membangun kesadaran politik. Pada waktunya nanti, calon pendidik ini akan ikut mewarnai karakter peserta didiknya sebagai warga negara (Ismail & Hartati.S, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan psikologis antara sikap mahasiswa dengan kebijakan penanganan Covid-19. Proses pembentukan sikap ini dilatarbelakangi oleh pemilihan Jokowi sebagai Presiden. Berdasarkan data dari

Komisi Pemilihan Umum, pada Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma'ruf terpilih sebagai pemenang secara nasional. Namun di Provinsi Sumatera Barat mengalami kekalahan mutlak berhadapan dengan pasangan Prabowo-Sandi. Perbedaan perolehan suara di tingkat nasional dan lokal ini berujung kepada sikap polarisasi politik mahasiswa itu sendiri (Azwar, 2013).

Di sosial media khususnya Twitter telah terjadi polarisasi antara kelompok populis pluralis dan populis Islam. Istilah populisme sendiri merujuk kepada gerakan politik yang menekankan kepentingan, ciri budaya dan perasaan spontan rakyat sebagai lawan dari elit yang memiliki hak istimewa. Gerakan populis sering menarik mayoritas secara langsung melalui pertemuan massa, referendum, atau bentuk lain dari demokrasi populer, tanpa banyak memperhatikan *checks and balances* atau hak-hak minoritas (Tella, 1995).

Dari beberapa penelitian terlihat bahwa terdapat kelompok pro dan kontra dalam melihat penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Di Amerika yang dianggap sebagai asal dari gerakan populisme, terlihat bahwa telah terjadi polarisasi ideologi politik antara kelompok elite ideologi konservatif dengan kelompok demokrat (Nugraheni & Sakti, 2021). Sementara di Indonesia, pengaruh kalangan elite politik yang sedang bertarung terlihat jelas pada beberapa peristiwa penting, yaitu: Pemilihan Presiden tahun 2014 Aksi Bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016, Pemilihan Presiden tahun 2019 dan Pilkada DKI tahun 2017.

Perseteruan ini secara jelas tampak dalam ranah sosial media untuk mempengaruhi masyarakat. Dikotomi sosial politik ini melibatkan partai politik, figur politik, ormas, tokoh agama dan kelompok masyarakat lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Namun belum ada penelitian yang fokus pada respon sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan Covid-19 pemerintah. Sehingga penelitian ini akan fokus kepada hubungan psikologis (*psychologically linkage*) antara sikap politik mahasiswa dengan sentimen agama, etnik dan resistansi terhadap Pilpres 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi mencakup mahasiswa Prodi PPKn pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Padang yang aktif pada Semester Genap 2021-2022. Jumlah total mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah: 121 orang. PTS yang terlibat adalah Universitas Bung Hatta (38%) dan Universitas PGRI (62%). Pengambilan sampel menggunakan total sampling, namun yang terealisasi adalah 95 mahasiswa (78,51%).

Instrumen yang digunakan adalah angket dengan model sakala Likert. Untuk menghitung frekuensi menggunakan Excel 2013, dan untuk analisis korelasionalnya dengan SPSS versi 20. Kategori frekuensi dan korelasionalnya adalah: SS= sangat kuat (80 -100%), S=kuat (60 - <80%), KS= kurang kuat (40 - <60%), TS= lemah (20 - <40%), dan STS= sangat lemah (0 - 20%) dengan penyesuaian istilah pada kolom "kategori pola" pada tabel dengan konteks indikatornya (Riduwan, 2015). Kategori tersebut paralel dengan kategori jawaban pada angket: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Untuk menentukan derajat ketajaman polarisasi digunakan prinsip Hukum Brewster dengan konversi makna: makin berimbang kekuatan yang disimbolkan dengan % antara yang pro

dengan yang kontra, maka makin tajam polarisasinya (Pylaev, 2020). Sebaliknya, makin tidak berimbang antara yang pro dan kontra, maka makin lemah polarisasinya, dengan modifikasi rumus: $F_n (\% \text{kecil}) : F_N (\% \text{besar}) * (100) = P(\text{derajat ketajaman polarisasi})$.

Statistik koefisien korelasi menggunakan interval kepercayaan 95% dengan $\alpha=0,05$ (5%), dengan kaidah: jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka terdapat hubungan signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) alias H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) alias H_0 diterima (H_a ditolak). Kemudian dengan $\alpha=0,05$ (5%), jika nilai Sig-nya lebih kecil (<) dari 0,05 maka antara variabel X dan Y terdapat hubungan yang signifikan. Untuk itu, $r_{tabel} = df (95-2, 0,05) = 0,202$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlihat rasionalitas sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Kategori Pola	Frekuensi (F)	Persentase (%)	Gabungan Sepola (%: riil)	Gabungan Sepola (%: latent/potential)
Sangat Rasional	226	17.0	55.4	
Rasional	510	38.4		70% (55,4+(29,3/2))
Kurang Rasional	390	29.3	29,3 (latent/potential)	
Tidak Rasional	185	13.9	15.3	30% (15,3+(29,3/2))
Sangat Tidak Rasional	19	1.4		
Jumlah	1330	100%	100%	100%

Tabel 1. Sikap politik mahasiswa dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19
 Sumber: Data primer diolah dengan Excel 2013

Dari tabel 1 diatas, terlihat bahwa polarisasi sikap politik mahasiswa dalam menanggapi kebijakan Covid-19 adalah 27,8% (lemah), sedangkan secara potential adalah 42,9% (kurang kuat). Berdasarkan data ini tampak bahwa lemahnya polarisasi politik mahasiswa mengindikasikan bahwa sikap politik mahasiswa masih sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika politik. Hal ini memperlihatkan bahwa mahasiswa di PTS kota Padang belum terkontaminasi oleh intrik-intrik negatif melalui politik praktis. Mahasiswa masih meyakini bahwa pemerintah bisa menangani Covid-19 dengan baik. Walaupun ada beberapa hal yang kurang memuaskan seperti larangan mudik, masuknya tenaga kerja asing China dan berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat lainnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang selaras dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah (Triyanto, 2021).

Kondisi pengetahuan mahasiswa yang cukup baik terhadap kebijakan Covid-19 tidak terlepas dari kontribusi pengetahuan politik dan kewarganegaraan mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi responden penelitian adalah mahasiswa Prodi PPKn yang memiliki kecakapan tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya kecerdasan politik mahasiswa. Kecerdasan politik memungkinkan individu dapat

memilah informasi yang menyesatkan dan kemudian membagikannya ke berbagai kalangan (Yustisia, 2021). Mahasiswa dapat mempertimbangkan bagaimana dampak dari situasi pandemi Covid-19 dan menentukan sikap ketika menyandang perannya sebagai mahasiswa dan warga negara (Mujtahidin, 2013).

Penelitian ini juga melihat hubungan sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dengan sikap mahasiswa terhadap Presiden Jokowi.

Korelasi			
		Sikap Legitimatif Terhadap Presiden (X1)	Sikap Terhadap Kebijakan Covid-19 (Y)
Sikap Legitimasi Terhadap Presiden (X1)	Pearson Correlation	1	,275**
	Sig. (2-tailed)		,007
	Sum of Squares and Cross-products	6040,589	1115,368
	Covariance	64,262	11,866
Sikap Terhadap Kebijakan Covid-19 (Y)	Pearson Correlation	,275**	1
	Sig. (2-tailed)	,007	
	Sum of Squares and Cross-products	1115,368	2718,105
	Covariance	11,866	28,916

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), Listwise N=95

Tabel 2. Sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dengan sikap terhadap Presiden Jokowi

Berdasarkan tabel diatas menegaskan bahwa sikap legitimasi mahasiswa terhadap Presiden Jokowi (X1) memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan sikap mahasiswa terhadap kebijakan Covid-19 (Y). Sementara nilai Correlations sebesar 0,275 ini masuk dalam kategori hubungan yang lemah. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin legitimatif sikap mahasiswa terhadap presiden maka semakin kuat pula dukungan mahasiswa terhadap kebijakan Covid-19.

Hubungan yang linear tersebut tidak terlepas dari eksistensi Jokowi sebagai presiden yang dapat diterima secara konstitusional, etik, moral dan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi merupakan indikator yang penting terhadap sikap politik yang mengakui keabsahan presiden secara faktual. Mahasiswa dapat menilai secara kritis dan menampilkan sikap politik rasional yang terlepas dari penilaian masa lalu terkait Pilpres 2019. Faktanya, di Sumatera Barat, pasangan Jokowi-Ma'rif Amin mengalami kekalahan.

Correlations			
		Resistensi Sikap Politik Pilpres 2019 (X2)	Sikap Terhadap Kebijakan Covid-19 (Y)
Resistensi Sikap Politik Pilpres 2019 (X2)	Pearson Correlation	1	,139
	Sig. (2-tailed)		,180
	Sum of Squares and Cross-products	824,484	207,579

	Covariance	8,771	2,208
Sikap Terhadap Kebijakan Covid-19 (Y)	Pearson Correlation	,139	1
	Sig. (2-tailed)	,180	
	Sum of Squares and Cross-products	207,579	2718,105
	Covariance	2,208	28,916
Listwise N=95			

Tabel 3. Sikap Mahasiswa terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19 dengan resistansi Sikap Politik Mahasiswa pada Pilpres 2019

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara resistansi sikap politik mahasiswa pada Pilpres 2019 (X2) dengan sikap mahasiswa terhadap kebijakan Covid-19 (Y). Tidak adanya hubungan ini juga mengandung makna bahwa betapapun kuatnya persepsi dalam pemberitaan media massa yang menyudutkan pemerintah pada masa Covid-19 namun bagi mahasiswa Prodi PPKn di kota Padang ternyata mereka masih mampu memilah informasi secara objektif. Sikap demikian selaras dengan sikap legitimatif mahasiswa di beberapa wilayah lainnya di Indonesia terhadap citra Jokowi sebagai presiden (Mujtahidin, 2013).

Terbentuknya hubungan positif antara sikap menghadapi kebijakan Covid-19 dengan pilihan politik Pilpres 2019 merupakan konsekuensi yang logis. Di Sumatera Barat, para pendukung Jokowi dan Prabowo seakan dapat bersatu kembali dalam menyikapi kebijakan di tingkat nasional dalam menangani Covid-19. Sikap ini sejalan dengan yang terjadi dalam perpolitikan nasional yang tidak lagi terjadi polarisasi pasca Pilpres 2019. Kedekatan Jokowi dan Prabowo telah mengakibatkan tidak adanya polarisasi di antara partai-partai politik utama. Sehingga, tidak ada lagi perbedaan mendasar di antara partai-partai mengenai kebijakan utama (Max Lane, 2021).

Sementara itu, sikap mahasiswa Prodi PPKn di kota Padang menunjukkan hal yang positif karena mereka dapat menerima kebijakan darurat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 tanpa melihat partai yang berkuasa. Hal ini dapat dimaklumi karena terdapat hubungan antara kognisi dan emosi yang dapat menentukan sikap subjektivitas dalam psikologi politik (Yustisia, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan Covid-19 pemerintah cenderung kurang kuat (42,9%). Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Padang dapat memilah sumber informasi yang benar terkait dengan pilihan politiknya pada Pilpres 2019, walaupun koefisiennya lemah/rendah (0,275). Sikap tersebut berbeda dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa sosial media berpengaruh besar terhadap pembentukan opini kebijakan penanganan Covid-19 dan Jokowi sebagai Presiden. Sehingga penelitian lanjutan diharapkan dapat melihat respons di daerah lain yang dianggap

memiliki polarisasi besar dalam menilai kebijakan pemerintah terhadap penanganan Covid-19.

REFERENSI

- Azwar, Syaifuddin. (2013) *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dixit, Avinash K. and Weibull, Jorgen W. (2007). *Political Polarization*. Department of Economics, Princeton University, Princeton, NJ 08544; and Department of Economics, Stockholm School of Economics, March 7
- Gustomy, R. (2020). Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 190-205.
- Ismail & Hartati, S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Jiwandono, I. S., Setiawan, H., & Oktavianti, I. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Politisasi Corona Virus Disease (Covid-19). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 286-299.
- Lane, M. (2021). 2021/73 "Political Parties' Manoeuvring after the Jokowi-Prabowo Rapprochement". *ISEAS Perspective 2021/73*, 2 June 2021
- Nugraheni, A., & Sakti, R. E. (2021). Keterbelahan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat Terkait Covid-19 dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menaati Protokol Kesehatan: Studi Perbandingan di AS dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 29-46.
- Nugroho, L. (2021). Peran komunikasi dalam manajemen konflik. *AL-IDZA'AH: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 1-11.
- Riduwan, 2015, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta. sahid
- Tella, T., & Torcuato, S. (1995). Populism. Lipset, Seymour M.(Hg.): *The Encyclopedia of Democracy*, Washington, DC, 985-989.
- Triyanto, T., Yana, R. H., Nurkhalis, N., & Juraida, I. (2021). Rasionalitas Pengetahuan dan Kemampuan Penanganan Covid-19 (Studi Pemahaman Mahasiswa di Aceh Barat). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 7(1), 52-64.
- Wadipalapa,R.P,. "Ekstremitas, Polarisasi, dan Imajinasi Politik". *Jawapostv*: [https://www.jawapos.com/opini/08/10/2021/ekstremitas-polarisasi-dan-imajinasi-politik/\(23-3-2022\)](https://www.jawapos.com/opini/08/10/2021/ekstremitas-polarisasi-dan-imajinasi-politik/(23-3-2022))
- Yustisia, W. (2021). Pengantar Psikologi Politik. In Chapter dalam *Buku Psikologi Politik*. Penerbit Buku Kompas.